

ABSTRAK

Kebijakan Jakarta *Smart City* merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola kota modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penelitian ini berangkat dari permasalahan rendahnya efisiensi layanan publik sektor mobilitas dan lingkungan yang sebelumnya dihadapkan oleh isu kemacetan dan polusi udara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Jakarta *Smart City* serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik di kedua sektor tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Hogwood & Gunn (1984) sebagai alat analisis yang berfokus pada pendekatan top-down. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Jakarta *Smart City* telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik, khususnya melalui program *JakLingko* di sektor mobilitas dan *Environmental Monitoring System (EMS)* serta uji emisi di sektor lingkungan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur digital, koordinasi lintas aktor yang belum optimal, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa, kebijakan Jakarta *Smart City* telah menunjukkan arah perkembangan positif menuju tata kelola kota cerdas yang berkelanjutan. Saran yang diajukan adalah perlunya peningkatan kolaborasi antar aktor, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga Jakarta.

Kata Kunci : *Smart City*, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Mobilitas, Lingkungan

ABSTRACT

The Jakarta Smart City policy is one of the efforts of the Provincial Government of DKI Jakarta to realize modern, effective, and public service-oriented urban governance. This research originates from the problem of low efficiency in public services within the mobility and environmental sectors, which have long been challenged by traffic congestion and air pollution issues. The study aims to analyze the implementation of the Jakarta Smart City policy and to assess the extent to which this policy contributes to improving the quality of public services in both sectors. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, documentation, and literature study. The analysis is based on Hogwood and Gunn's (1984) policy implementation theory, which emphasizes a top-down approach. The findings indicate that the implementation of the Jakarta Smart City initiative has had a positive impact on the efficiency and effectiveness of public services, particularly through the JakLingko program in the mobility sector and the Environmental Monitoring System (EMS) as well as vehicle emission testing in the environmental sector. However, its implementation still faces several obstacles, such as limited digital infrastructure, suboptimal cross-actor coordination, and low levels of public participation. The study concludes that the Jakarta Smart City policy demonstrates a positive trajectory toward sustainable Smart City governance. The research suggests the need to strengthen collaboration among stakeholders, enhance human resource capacity, and promote active public participation to support the development of innovative, efficient, and responsive public services that meet the needs of Jakarta's citizens.

Keywords: Smart City, Policy Implementation, Public Service, Mobility, Environment.